 **PEMANDANGAN UMUM **

**FRAKSI AMANAT-DEMOKRAT**

**DPRD NGADA**

**TERHADAP PENGANTAR NOTA KEUANGAN ATAS RANCANGAN PERATUAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2025**

Yth. Pimpinan dan bapak-bapak Anggota DPRD Ngada

Yth. Bupati dan Wakil Bupati Ngada

Yth. Penjabat SEKDA Ngada

Yth. Para Staf Ahli Bupati Ngada

Yth. Para Asisten Setda Ngada

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah Ngada

Yth. Pimpinan BUMN/BUMD

Yth. Para Camat sekabupaten Ngada

Yth. Bapak/Ibu Penjabat Kepala Desa, Kepala Desa dan Lurah sekabupaten Ngada

Yth. Saudara/saudari Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Ahli Pimpinan DPRD Ngada

Yth. Rekan-Rekan Media (Cetak dan Elektronik)

**Singkatnya Bapak/Ibu, Hadirin Sidang Dewan Yang Terhomat**

***Shalom***

***Salve***

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

***Om Swastiasu***

***Namo Budhaya***

***Salam Kebajikan***

**Selamat pagi dan Salam sejahtera buat kita semua**

Sebagai insan beriman, maka terlebih dahulu Fraksi mengajak kita sekalian untuk menaikan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Sang Alva dan Omega, Karena atas berkat PenyelenggaraanNya sehingga pada hari ini kita boleh hadir kembali dalam ruang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita yang hadir dalam ruang ini adalah orang-orang yang diutus untuk mengabdikan diri bagi orang lain dan kemajuan daerah ini. Sehingga kita mesti terus memohon tuntunan dari Sang Khalik Agung, agar setiap kerja kita harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat kabupaten Ngada. Hal yang akan sangat bertentangan dengan kodrati iman kita, apabila kita menggunakan **kuasa dan jabatan** yang kita miliki untuk **mencelakakan** masyarakat kabupaten Ngada. Harus disadari bahwa tidak ada yang abadi di bawah kolong langit ini. Karena **Kuasa dan Jabatan** yang dimiliki hanya bersifat semantara, dan sewaktu-waktu Tuhan akan cabut dari kita dan dipindahkan kepada orang lain. Fraksi ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami Fraksi Amanat-Demokrat DPRD Ngada untuk menyampaikan **Pemandangan Umum** Terhadap Ranperda Perubahan APBD Ngada Tahun Anggaran 2025. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah yang telah menyiapkan dokumen perubahan APBD 2025 dan telah disampaikan kepada lembaga DPRD Ngada yang terhormat. Melalui mimbar yang terhormat ini, Fraksi juga ingin menyampaikan **selamat dan proficiat kepada saudara Siprianus Bhuka atau biasa disapa *SILET OPEN UP*** yang telah mengharumkan nama kabupaten Ngada di Istana Negara dengan tembang manisnya **Tabola Bale** yang menggetarkan kuping Presiden **Prabowo Subianto.**

**Pimpinan sidang dan Forum Paripurna yang kami Muliakan**

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, telah berdampak pada beberapa alokasi anggaran yang harus dicadangkan oleh pemerintah pusat untuk tidak ditransferkan ke daerah. Sala satunya adalah berkurangnya belanja infrastruktur pelayanan publik yang berdampak pada efek penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan diskusi dan kajian kritis Fraksi, terhadap kebijakan Efisiensi yang diputuskan oleh **Presiden Prabowo Subianto** atau yang kita sebut sebagai *Kontra Fiskal Daerah* memiliki empat alasan mendasar:

1. Penyesuaian fiskal yang dilakukan merupakan koreksi dan pemberian arah baru bagi politik anggaran yang selama dua tahun terakhir ini berfokus pada pembangunan infrastruktur berbasis utang sehingga mengganggu kesehatan APBN;
2. Terkait dengan alasan pertama, dengan koreksi terhadap politik anggaran ini, pemerintah juga memberikan sinyal penegakan disiplin fiskal dengan lebih berhati-hati dalam mengendalikan laju pertumbuhan utang pemerintah sampai akhir tahun 2024 yang cukup mengkhwatirkan, dengan perkiraan mencapai RP 8,801,09 Triliun. Angka ini merupakan rekor tertinggi jumlah utang yang pernah dilakukan pemerintah di era reformasi;
3. Pengurangan anggaran akan berdampak pada postur APBN dalam dua atau tiga tahun mendatang. Hal ini mengingat penyesuaian fiskal bukanlah sebuah kebijakan yang bersifat *one-off,* melainkan akan memiliki dampak ekonomi jangkah panjang atau setidak-tidaknya pada tahun anggaran berikutnya;
4. Dampak dari penyesuaian belanja tersebut juga dirasakan ditingkat daerah. Pemerintah daerah yang sangat bergantung pada Transfer Dana dari pusat seringkali menghadapi kendala dalam melanjutkan program-program pembangunan ketika penerimaan Negara menurun.

Tentunya dari empat alasan mendasar yang dikemukakan di atas sebagai **Kontra Fiskal** daerah, harus bisa dimaknai oleh pemerintah kabupaten Ngada saat ini bukan sebagai tantangan, melainkan sebagai peluang untuk bisa menciptkan pemerintahan yang kreatif dan inovatif dalam mengatasi kesulitan fiskal daerah. Di lain pihak, terhadap kebijakan fiskal daerah ini, sebenarnya pemerintah pusat sedang mendorong pemerintah daerah untuk bisa memanfaatkan sala satu ruang regulasi **OTONOMI DAERAH** yang mengarah pada **RUANG KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH.** Fraksi melihat bahwa potensi kebijakan efisiensi ini akan terus berlanjut pada tahun 2026 dan tahun anggaran yang akan datang. Apabila kebijakan Efisiensi ini terus berlanjut, maka memiliki tantangan tersendiri bagi kabupaten Ngada, sebagai sala satu kabupaten yang 97% (sembilan puluh tuju persen) membiayai **Belanja Daerah**  bergantung pada **Dana Transfer,** karena kemampuan **PAD Kabupaten Ngada** hanya 3% (Tiga Persen) bisa membiayai **Belanja Daerah.**  Kebijakan Efisiensi ini lahir bersamaan dengan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat karena memiliki Visi, Misi dan Janji Kampanye yang berpihak pada rakyat kecil, kaum lemah dan kelompok termarginal. Termasuk kabupaten Ngada, dibawah Visi pemerintah yang baru yaitu Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Sumberdaya Alam Berkelanjutan, dengan fokus pembangunannya adalah **Membangun Desa Menata Kota.** Untuk menjawabi Visi, Misi dan Fokus pembangunan selama lima tahun kedepan, maka pemerintah yang baru perlu memaksimalkan semua potensi penerimaan daerah dengan semua kerangka regulasinya agar bisa meningkatkan **Pendapatan Asli Daerah (PAD),** sehingga dari sumber **PAD** tersebut bisa digunakan untuk memenuhi Visi Misi dan Janji Kampanye. **Mengutip Pernyataan Greg Philip, *sejatinya kekuatan yang anda miliki di dalam diri anda lebih besar dibandingkan dengan hambatan yang anda hadapi. Dengan kata lain, hanya pemimpin kuat yang mampu menggunakan kekuatan kepemimpinan.***

**Pimpinan sidang dan Forum Paripurna yang kami Banggakan**

Komposisi Perubahan APBD Ngada Tahun Anggaran 2025 dapat terbaca sebagai berikut:

1. **Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar **RP 913.132.854.716,73 (**sembilan ratus tiga belas miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu tuju ratus enam belas ribu rupiah tuju puluh tiga sen**)** mengalami penurunan secara drastis sebesar **RP 56.065.952.131,17. Komponen Pendapatan Daerah ini terdiri dari:**

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar RP 71.503.104.943,90,** Bertambah sebesar **RP 6.619.655.301,00.** Komponen PAD ini terdiri dari:

* Penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar RP 21.849.140.142,90, turun sebesar RP 1.000.000.000;
* Penerimaan Hasil Retribusi Daerah sebesar RP 31.588.509.500,00, turun sebesar RP 421.200.000,00;
* Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar RP 2.084.889.240,00, turun sebesar RP 1.715.110.760,00, dan
* Penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD yang sah sebesar RP 15.980.566.061,00, naik sebesar RP 10.055.966.061,00.

1. **Pendapatan Transfer**

**Pendapatan Transfer sebesar RP 833.607.352.721,00, Turun sebesar RP 63.390.616.545.** Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari **Insentif Fiskal sebesar RP 6.747.148.000,00,** Turun sebesar RP 44.281.000,00. **Dana Bagi Hasil sebesar RP 6.383.847.000, Naik sebesar RP 1.598.158.000,00. Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya (*Block Grant*) sebesar RP 433.818.004.000. Dana Alokasi Umum** yang telah ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*) **Sebesar RP 60.966.740.000,00, Turun sebesar RP 34.209.457.000,00** Bersumber dari DAU Specific Grant bidang Pekerjaan Umum. **Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar RP 64.292.182.000,00, Turun sebesar RP 30.061.419.000 bersumber dari DAK Fisik bidang jalan. Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar RP 130.455.783.592,00, Turun sebesar RP 4.510.886.408,00. Dana Desa sebesar RP 15.008.354.129,00, Naik sebesar RP 3.837.268.863,00.**

1. **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar RP 8.022.397.051,83, Naik sebesar RP 405.009.112,83.**
2. **Belanja Daerah**

Belanja Daerah sebesar **RP 989.936.952.207,19** naik sebesar **RP 1.192.826.080,29**. Belanja Daerah Terdiri dari :

1. **Belanja Operasi :**direncanakan sebesar **RP 688.811.054.248,19,** Naik sebesar **RP 9.413.387.982,29.** Belanja operasi ini terdiri dari:

* **Belanja Pegawai direncanakan sebesar RP 464.622.620.782,85, Turun sebesar RP 15.355.731.281,09.**
* **Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar RP 219.223.177.465,34, naik sebesar RP 23.879.119.263,38**
* **Belanja Hibah direncanakan sebesar RP 4.535.756.000,00,** Naik sebesar **RP 2.700.500.000;**
* **Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar RP 429.500.000,00, Turun sebesar RP 1.810.500.000,00.**

1. **Belanja Modal**

Belanja Modal direncakan sebesar **RP 90.197.690.279,00,** berkurang sebesar **RP 12.508.561.902.** Belanja Modal ini terdiri dari:

* Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **RP 15.347.956.739,00**, berkurang sebesar **RP 2.987.922.742,00**
* Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar **RP 47.302.039.159,00** bertambah sebesar **RP 31.162.539.159,00**
* Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan sebesar RP **21.975.429.016,00,** Berkurang sebesar **RP 41.919.045.984,00**
* Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebesar **RP** **3.258.616.100,00**, Bertambah sebesar RP 1.028.218.400,00, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar **RP 2.313.649.265,00**

1. **Belanja Tidak terduga (BTT)** direncanakan sebesar **RP 5.800.000.000, bertambah sebesar RP 1.300.000.000,00.**
2. **Belanja Transfer** direncanakan sebesar **RP 205.128.207.680,00, Naik sebesar RP 2.988.000.000.**
3. **Pembiayaan Daerah**

Penerimaan Pembiayaan yang digunakan dalam rangka menutup deficit anggaran pada rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar **RP 79.746.727.490,46,** Naik sebesar **RP 57.258.778.211,46.** Rancangan Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD 2025 sebesar **RP 2.942.630.000** yang akan dialokasikan untuk penyertaan modal pada Bank NTT.

Dari komposisi proyeksi Perubahan APBD 2025 di atas, Fraksi Amanat-Demokrat ingin menyampaikan beberapa catatan kritis sekaligus permintaan penjelasan dari pemerintah:

* 1. Adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Efisiensi Belanja Daerah telah berdampak pada pemangkasan anggaran bidang Infrastruktur dan pelayanan publik. Dampak ikutannya adalah berkurangnya pada pos Pendapatan Daerah yang bersumber dari konstruksi fisik. Di tengah kondisi efisiensi seperti ini ada hal yang controversial, dimana pemerintah saat ini banyak menggelontorkan anggaran seremonial kebudayaan yang bersifat konsumtif. Pemerintah bisa menjelaskan kepada Fraksi, hubungan pemanfaatan anggaran dibidang hajatan kebudayaan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan evek penerimaan bagi daerah?.
  2. Fraksi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang baru saat ini, karena diawal kepemimpinan sudah menghadirkan banyak sekali Investor di kabupaten Ngada. Investor adalah orang-orang yang ingin menanamkan modal di kabupaten Ngada, menciptakan lapangan pekerjaan, dan akan berdampak pada peningkatan PAD. Pertanyaan yang ingin Fraksi kemukakan sudah berapa investor yang menandatangani *MOU* dan bergerak dibidang apa saja, serta dampak penerimaan bagi daerah setiap tahun anggaran.
  3. **Belanja Tidak Terduga (BTT)** diproyeksikan sebesar **RP 5.800.000.000,** bertambah sebesar **RP 1.300.000.000,** dibandingkan pada APBD Induk sebesar **RP 4.500.000.000,00.** Terhadap kenaikan pada BTT ini, Fraksi minta penjelasan pemerintah terhadap realisasi BTT sampai dengan saat ini dan rincian penggunaannya. Selanjutnya dari konteks waktu saat ini tinggal lagi 2 (dua) bulan kita akan memasuki tahun anggaran 2026. Fraksi sungguh tidak berharap kita menggelontorkan anggaran yang bersifat *idline money* (uang nganggur).
  4. ***Tagline*** pemerintah saat ini adalah **Membangun Desa dan Menata Kota.** Pemerintah bisa menjelaskan kepada Fraksi berapa proyeksi persentase anggaran setelah perubahan APBD Ngada 2025 khusus untuk penataan kota Bajawa. Karena kita semua sama-sama menyaksikan kondisi *eksisting* Kota Bajawa saat ini seperti lampu jalan, penataan trotoar, dan penertiban para penjual yang belum diurus secara baik oleh pemerintah.
  5. Untuk *Tagline* **Membangun Desa,** Pemerintah bisa menjelaskan sala satu program unggulan (*Branding*) yang mulai dikerjakan oleh pemerintah saat ini terhadap masyarakat Desa. Contoh di zaman Pemerintah **MULUS** ada **Program PELANGI DESA.**

**Pimpinan sidang dan Forum Paripurna yang kami Hormati**

Berkenaan dengan sidang Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 ini, maka ijinkanla kami Fraksi Amanat-Demokrat untuk menyampaikan beberapa hal sekiranya mendapat penjelasan dari pemerintah:

1. Fraksi meminta penjelasan pemerintah terhadap pemekaran wilayah kecamatan Bajawa, kecamatan Jerebu dan tahapan konsilidasi pemekaran kecamatan Riung menjadi Riung Timur di Lengkosambi dan Riung Tengah di Wangka. Kecamatan Riung barat dimekarkan menjadi Riung barat daya di Lindi;
2. Fraksi meminta penjelasan pemerintah terhadap usulan YASUKDA Ngada berkaitan dengan Permohonan Hibah Aset Tanah dan Bangunan untuk Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa STIPER Flores Bajawa;
3. Fraksi meminta kepada Pemerintah untuk memperhatikan pembangunan infrastrukur jalan dalam wilayah Ibu Kota Kecamatan (IKK) Riung, Soa, Bajawa utara, Golewa, Golewa Barat dan Golewa selatan;
4. Fraksi meminta kepada pemerintah agar pada tahun 2025 perlu memperbaiki segmen jalan dari pertigaan Wangka menuju Maronggela Ibu kota kecamatan Riung barat;
5. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk perlu memperhatikan peningkatan jalan dari pertigaan Lampatabhi menuju Munting Desa Ngara Kecamatan Riung barat;
6. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk perlu memperhatikan peningkatan jalan dari Ngoton menuju Namut Desa Wolomeze II-Kecamatan Riung barat;
7. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk perlu memperhatikan peningkatan jalan dari Moronggela menuju Desa Ria I kecamatan Riung barat;
8. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk perlu memperhatikan peningkatan jalan dari Mok-Mbazang-Warunembu-Teong Desa Lanamai I-kecamatan Riung barat;
9. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk membuka jalan dari Damu-Siring-Maronggela Desa Wolomeze Kecamatan Riung barat;
10. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan, melanjutkan pembangunan jalan dari Nuamuzi Rakateda 1- Ngedumee,Naidewa Desa Watunai Kecamatan Golewa Barat – Wajamala Desa Radabata 1 Kecamatan Golewa
11. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan dan melanjutkan pembangunan jalan dari depan Kampus CBN Malanuza – Puskesmas Malanuza – Pertigaan jalan Malanuza – Maumbawa (kampong Boaweo) Kecamatan Golewa
12. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan dan melanjutkan pembangunan jalan Pertigaan Rakalaba – Zeu Desa Sobo 1
13. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan dan melanjutkan pembangunan jalan alternative dan pertanian Toda – Tukahebho Kelurahan Todabelu – Gebha Gea – Kantor Desa Ekoroka Kecamatan Golewa
14. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan dan melanjutkan pembangunan jalan alternative kendaraan jalur Maumbawa menuju Pasar Malanuza , dari pertigaan Kampung Boaweo – Ngabakana – lingkar tuka Nuza – Desa Malanuza Kecamatan sesuai kode link Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada
15. Fraksi meminta kepada pemerintah bersama ATR/BPN Kabupaten Ngada, untuk segera melakukan proses Pensertifikatan tanah BP3 SDN Koeloda, yang sudah mempunyai kekuatan hukum sesuai penjelasan Hukum di Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Juru Bicara Negeri Bajawa Bapak **Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H**.,**M.H** bersama Pemerintah daerah dan instansi terkait.
16. Fraksi meminta kepada pemerintah bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan, PUPR untuk melakukan pemboron air untk melayani petani Holtikultra kawasan Sega/Puungadu Kecamatan Golewa Barat.
17. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk perlu memperhatikan infrastruktur pertanian di persawahan Soa, Malatawa dan Wekalope.
18. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk perlu memperhatikan peningkatan jalan Gou-Kisaraghe kecamatan Bajawa utara, ruas jalan Turamuri-Tarawaja kecamatan Soa, dan ruas jalan di RT 14 Kelurahan Lebijaga kecamatan Bajawa;
19. Fraksi meminta kepada pemerintah melalui dinas terkait untuk perlu memperhatikan ruas jalan dari Rakalaba ke Jerebu, jalan dari Nuamuzi-Ngedume, Naidewa dan Wajamala;
20. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk perhatian peningkatan jalan menuju fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan;
21. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan peningkatan jalan usaha tani dari Ngedugodi Desa Watumanu ke Saga Bena ke Desa Wongawea kecamatan Jerebu;
22. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan peningkatan jalan usaha tani dari Desa Manubhara ke Desa Tiwurana Kecamatan Inerie;
23. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan peningkatan jalan dari Desa Nenowea Kecamatan Jerebu ke Desa Legeriwu Kecamatan Inerie;
24. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan peningkatan jalan dari Desa Mawokisa ke Desa Heawea kecamatan Aimere;
25. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan peningkatan jalan dari Kantor camat Inerie ke Desa Tiwurana kecamatan Inerie;
26. Fraksi meminta kepada pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengadakan satu unit alat pemadam kebakaran di kampung Gurusina kecamatan Jerebu;
27. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk pembangunan laboratorium di UPTD Puskesmas Mangulewa;
28. Fraksi meminta kepada pemerintah kabupaten Ngada melalui Dinas Lingkungan Hidup agar ada alokasi anggaran untuk budidaya bambu di kabupaten Ngada;
29. Fraksi meminta perhatian pemerintah agar rumah sentra Industri Bambo di Mataloko segera dimanfaatkan dan harus ada penataan infrastruktur disekitar lokasi tersebut.
30. Fraksi meminta kepada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran secara bertahap sehubungan dengan Perayaan satu abad Seminari ST.Yohanes Berachmans Todabelu Mataloko.
31. Fraksi meminta perhatian pemerintah melalui Dinas terkait untuk memperhatikan ruas jalan dari Jerebu ke Dona akibat terjadi patahan pada ruas jalan tersebut.
32. Fraksi meminta perhatian pemerintah untuk pembangunan *Bouk Deucker* dari Tada ke Watumanu Kecamatan Jerebu.
33. Fraksi meminta penjelasan pemerintah terhadap penanganan kampung Bowaru yang mengalami kebencanaan akibat terjadi patahan.
34. Fraksi meminta pemerintah untuk memperhatikan dua panti pengasuh anak-anak berkebutuhan khusus di kabupaten Ngada yaitu panti Citra dan Panti Alma.

Demikian pemandangan umum Fraksi Amanat-Demokrat menanggapi Pengantar Nota Keuangan atas Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025. Akhirnya dengan Memohon Berkat dan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas restu dari forum yang terhormat, Fraksi Amanat-Demokrat DPRD Ngada menyatakan **MENERIMA RANPERDA PERUBAHAN APBD 2025** untuk dibahas dalam masa sidang ini sesuai dengan mekanisme kedewanan. Sekian dan terima kasih.

Bajawa, 27 Agustus 2025

**FRAKSI AMANAT-DEMOKRAT**

**DPRD NGADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Tanda tangan** |
| 1 | Yohanes Donbosko Ponong, S.Pd | Ketua |  |
| 2 | Benediktus Lagho, S.Pd | Sekretaris |  |
| 3 | Florianus Rero, S.E | Anggota |  |